

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA  
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dengan adanya penambahan 10% dari Realiasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Kabupaten, maka perlu penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 dari total Rp. Rp. 977.000.000,- menjadi Rp. 1.329.800.000,-;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK/07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGALOKASIAN DANA BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2020.**

#### **PASAL I**

Beberapa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengalokasian Dana Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Total Alokasi DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 1.329.800.000,- **(Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).**
- (2) Hasil perhitungan DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **PASAL II**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
  - a. Terhadap Alokasi DBH Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa yang berubah untuk segera melakukan Perubahan APBDesa menyesuaikan dengan Pagu dalam Peraturan Bupati ini.
  - b. Terhadap permohonan penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 agar setiap Desa menyampaikan Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud huruf a.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 24 September 2020

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**PERDIE M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 24 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**HERMON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2020 NOMOR 29.**

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN... I	
KABAG HUKUM	
KSB BAG... <i>per-III</i>	
STAF ADMINISTRASI	



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 29 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14**  
**TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN**  
**PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN**  
**2020.**

**PENETAPAN RINCIAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	DESA	PAJAK	RETRIBUSI DAERAH	BESARAN (RP)
1	2	3	4	5	6=4+5
1	MURUNG	1 DIRUNG	9,618,600	2,084,400	11,703,000
		2 MALASAN	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		3 BATU PUTIH	16,031,600	2,084,400	18,116,000
		4 MANGKAHUI	22,097,600	2,084,400	24,182,000
		5 PANUUT	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		6 MUARA UNTU	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		7 MUARA JAAN	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		8 BAHITOM	48,658,600	2,084,400	50,743,000
		9 DANAU USUNG	11,789,600	2,084,400	13,874,000
		10 JUKING PAJANG	24,692,600	2,084,400	26,777,000
		11 MUARA SUMPOI	9,066,600	2,084,400	11,151,000
		12 MUARA BUMBAN	7,662,600	2,084,400	9,747,000
		13 PENYANG	6,795,600	2,084,400	8,880,000
		JUMLAH I			<b>178,923,800</b>
2	TANAH SIANG	1 KONUT	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		2 TINO TALIH	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		3 OSOM TOMPOK	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		4 BELAWAN	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		5 OLUNG SOLOI	6,459,600	2,084,400	8,544,000
		6 SUNGAI LUNUK	7,347,600	2,084,400	9,432,000
		7 MUWUN	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		8 CANGKANG	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		9 PURUK BATU	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		10 KALANG KALUH	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		11 TABULANG	11,293,600	2,084,400	13,378,000
		12 KARALI	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		13 OLUNG ULU	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		14 OLUNG DOJOU	9,979,600	2,084,400	12,064,000
		15 DOAN ARUNG	8,906,600	2,084,400	10,991,000
		16 MAHANYAN	10,651,600	2,084,400	12,736,000
		17 SERUHUNG	12,906,600	2,084,400	14,991,000
		18 OLUNG SIRON	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		19 TOKUNG	7,016,600	2,084,400	9,101,000
		20 DIRUNG BAKUNG	10,129,600	2,084,400	12,214,000
		21 OLUNG NANGO	8,092,600	2,084,400	10,177,000
		22 MANTIAT PARI	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		23 KOLAM	8,045,600	2,084,400	10,130,000
		24 NONO KLIWON	8,467,600	2,084,400	10,552,000
		25 OLUNG BALO	20,030,600	2,084,400	22,115,000
		26 MANGKOLISOI	10,208,600	2,084,400	12,293,000
JUMLAH II			<b>207,067,600</b>	<b>54,194,400</b>	<b>261,262,000</b>
3	TANAH SIANG SELATAN	1 ORENG	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		2 OLUNG MURO	11,031,600	2,084,400	13,116,000
		3 OLUNG HANANGAN	10,824,600	2,084,400	12,909,000
		4 DIRUNG LINGKIN	19,737,600	2,084,400	21,822,000
		5 DATAH KOTOU	13,232,600	2,084,400	15,317,000
		6 TAHUJAN ONTU	21,574,600	2,084,400	23,659,000
		7 PURUK KAMBANG	46,315,600	2,084,400	48,400,000
JUMLAH III			<b>128,344,200</b>	<b>14,590,800</b>	<b>142,935,000</b>





NO	KECAMATAN	DESA	PAJAK	RETRIBUSI DAERAH	BESARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6=4+5	
4	BARITO TUHUP RAYA	1	BUMBAN TUHUP	8,045,600	2,084,400	10,130,000
		2	MAKUNJUNG	10,676,600	2,084,400	12,761,000
		3	DIRUNG SARARONG	6,082,600	2,084,400	8,167,000
		4	KOHONG	9,651,600	2,084,400	11,736,000
		5	HINGAN TOKUNG	7,286,600	2,084,400	9,371,000
		6	LIANG NYALING	6,159,600	2,084,400	8,244,000
		7	TUMBANG BAUH	8,022,600	2,084,400	10,107,000
		8	TUMBANG MASALO	5,992,000	2,094,000	8,086,000
		9	BATU TOJAH	7,815,600	2,084,400	9,900,000
		10	TUMBANG BALOI	9,554,600	2,084,400	11,639,000
		11	CINTA BUDIMAN	6,482,600	2,084,400	8,567,000
		JUMLAH IV			<b>85,770,000</b>	<b>22,938,000</b>
5	LAUNG TUHUP	1	BATU TUHUP	13,947,600	2,084,400	16,032,000
		2	TUMBANG BAHAN	6,425,600	2,084,400	8,510,000
		3	MUARA LAUNG II	11,352,600	2,084,400	13,437,000
		4	BERAS BELANGE	7,976,600	2,084,400	10,061,000
		5	PELACI	6,772,600	2,084,400	8,857,000
		6	BIHA	6,607,600	2,084,400	8,692,000
		7	DIRUNG PUNDU	7,683,600	2,084,400	9,768,000
		8	DIRUNG PINANG	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		9	MUARA TUPUH	12,069,600	2,084,400	14,154,000
		10	NARUI	6,630,600	2,084,400	8,715,000
		11	TUMBANG BANA	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		12	LAKUTAN	6,611,600	2,084,400	8,696,000
		13	TAWAI HAUI	6,824,600	2,084,400	8,909,000
		14	PENDA SIRON	6,717,600	2,084,400	8,802,000
		15	MUARA MARUEI I	15,255,600	2,084,400	17,340,000
		16	MUARA MARUEI II	12,593,600	2,084,400	14,678,000
		17	BERALANG	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		18	KALANG DUHUNG	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		19	BATU BUA II	6,715,600	2,084,400	8,800,000
		20	TAHUJAN LAUNG	7,075,600	2,084,400	9,160,000
		21	TUMBANG BONDANG	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		22	TUMBANG TONDUK	6,320,600	2,084,400	8,405,000
		23	BATU KARANG	6,488,600	2,084,400	8,573,000
JUMLAH V			<b>182,207,800</b>	<b>47,941,200</b>	<b>230,149,000</b>	
6	PERMATA INTAN	1	SUNGAI GULA	15,741,600	2,084,400	17,826,000
		2	SUNGAI BATANG	8,260,600	2,084,400	10,345,000
		3	TUMBANG SALIO	11,759,600	2,084,400	13,844,000
		4	PURNAMA	8,089,600	2,084,400	10,174,000
		5	SUNGAI LOBANG	9,905,600	2,084,400	11,990,000
		6	PANTAI LAGA	7,142,600	2,084,400	9,227,000
		7	BARATU	7,777,600	2,084,400	9,862,000
		8	JUKING SOPAN	9,606,600	2,084,400	11,691,000
		9	MUARA BABUAT	12,658,600	2,084,400	14,743,000
		10	SEI BAKANON	5,627,600	2,084,400	7,712,000
JUMLAH VI			<b>96,570,000</b>	<b>20,844,000</b>	<b>117,414,000</b>	
7	SUNGAI BABUAT	1	BATU MIRAU	10,087,600	2,084,400	12,172,000
		2	TAMBELUM	10,439,600	2,084,400	12,524,000
		3	TUMBANG BANTIAN	10,466,600	2,084,400	12,551,000
		4	TUMBANG SAAN	7,330,600	2,084,400	9,415,000
		5	TUMBANG KOLON	6,473,600	2,084,400	8,558,000
		6	TUMBANG APAT	10,430,600	2,084,400	12,515,000
JUMLAH VII			<b>55,228,600</b>	<b>12,506,400</b>	<b>67,735,000</b>	



NO	KECAMATAN	DESA	PAJAK	RETRIBUSI DAERAH	BESARAN (RP)
1	2	3	4	5	6=4+5
8	SUMBER BARITO	1 KALAPEH BARU	5,627,600	2,084,400	7,712,000
		2 TUMBANG MASAO	7,268,600	2,084,400	9,353,000
		3 BATU MAKAP	11,785,600	2,084,400	13,870,000
		4 OLONG LIKO	7,311,600	2,084,400	9,396,000
		5 TELOK JOLO	7,068,600	2,084,400	9,153,000
		6 LAAS BARU	10,065,600	2,084,400	12,150,000
		7 TUMBANG TUAN	6,011,600	2,084,400	8,096,000
		8 TUMBANG MOLUT	6,132,600	2,084,400	8,217,000
		JUMLAH VIII		<b>61,271,800</b>	<b>16,675,200</b>
9	SERIBU RIAM	1 TUMBANG TOHAN	6,654,600	2,084,400	8,739,000
		2 TUMBANG NAAN	8,036,600	2,084,400	10,121,000
		3 MUARA JOLOI I	10,495,600	2,084,400	12,580,000
		4 MUARA JOLOI II	9,255,600	2,084,400	11,340,000
		5 PARAHAU	6,280,600	2,084,400	8,365,000
		6 TUMBANG JOJANG	6,820,600	2,084,400	8,905,000
		7 TAKAJUNG	6,504,600	2,084,400	8,589,000
		JUMLAH IX		<b>54,048,200</b>	<b>14,590,800</b>
10	U'UT MURUNG	1 TUMBANG TUJANG	7,502,600	2,084,400	9,587,000
		2 TUMBANG OLONG	7,413,600	2,084,400	9,498,000
		3 KALASIN	7,483,600	2,084,400	9,568,000
		4 TUMBANG TOPUS	6,392,600	2,084,400	8,477,000
		5 TUMBANG OLONG II	9,775,600	2,084,400	11,860,000
		JUMLAH X		<b>38,568,000</b>	<b>10,422,000</b>
<b>TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X</b>			<b>1,088,000,000</b>	<b>241,800,000</b>	<b>1,329,800,000</b>

BUPATI MURUNG RAYA,

  
PERDIE M. YOSEPH

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN...I	
KABAG HUKUM	
KSB BAG... per-III	
STAF ADMINISTRASI	